



# INFORMASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA

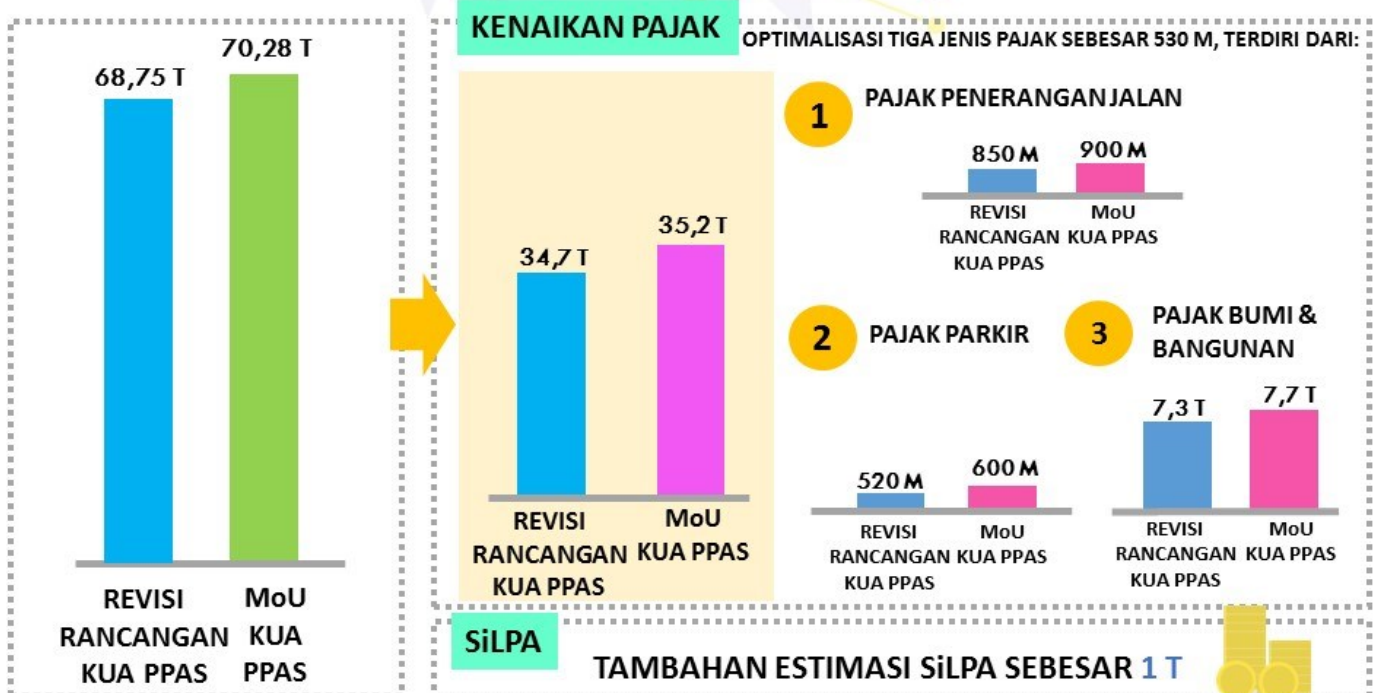
## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

### PENJELASAN UMUM PEMBAHASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

#### A. Penyusunan dan Kesepakatan Bersama KUA PPAS 2017

1. Revisi Rancangan KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dikirimkan dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4614/-1.713 tanggal 20 Oktober 2016 hal Penyampaian Revisi Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD sebesar Rp. 68,75 Triliun. Setelah melalui proses pembahasan antara TAPD bersama Banggar, KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 disepakati sebesar Rp.70,28 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp.1,53 Triliun.
2. Adapun peningkatan tersebut berasal dari :
  - a. Optimalisasi tiga jenis pajak sebesar Rp. 530 Miliar, yang meliputi :
    - Pajak Penerangan Jalan dari Rp. 850 Miliar, menjadi Rp. 900 Miliar, naik Rp. 50 Miliar;
    - Pajak Parkir dari Rp. 520 Miliar, menjadi Rp. 600 Miliar, naik Rp. 80 Miliar;
    - PBB dari Rp. 7,3 Triliun menjadi Rp. 7,7 Triliun, naik Rp. 400 M.
  - b. Kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1 Triliun yang berasal dari kenaikan estimasi SiLPA dari Rp.4,7 Triliun menjadi Rp.5,7 Triliun.

#### POSISI KUA PPAS



Gambar 1 Kenaikan Pajak dan Estimasi SiLPA

3. Peningkatan dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, antara lain :

a. Belanja Langsung, antara lain :

- Pembelian lahan sebesar 749,9 Miliar yang terdiri dari:
  - 1) Lahan untuk terbuka hijau 300 Miliar
  - 2) Lahan untuk Rusun 200 Miliar
  - 3) Lahan untuk Waduk/Situ/embung 100 Miliar
  - 4) Lahan Makam 100 Miliar
  - 5) Lahan Sungai Saluran 49,9 Miliar
- Pengadaan Alat Berat sebesar Rp.291 Miliar yang terdiri dari:
  - 1) Alat berat kebersihan air 125 Miliar
  - 2) Alat berat kebersihan 102 Miliar
  - 3) Alat berat tata air 64 Miliar
- Pembangunan Jalan, Jalan tidak sebidang dan pemeliharaan sebesar Rp.209 Miliar;
- Reverse Osmosis (RO) Kep. Seribu sebesar Rp.93,5 Miliar;
- Pengadaan Truck Compactor sebesar Rp.82,5 Miliar;
- Pengadaan Gerobak Motor sebesar Rp.25 Miliar;

b. Belanja Tidak Langsung, antara lain :

- Belanja Hibah Honor guru madrasah non PNS sebesar Rp.51 Miliar;
- Belanja Hibah PPMK Rp. 35,69 Miliar.



Gambar 2. Alokasi Peningkatan Dana untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

## B. Penyusunan dan Persetujuan RAPBD

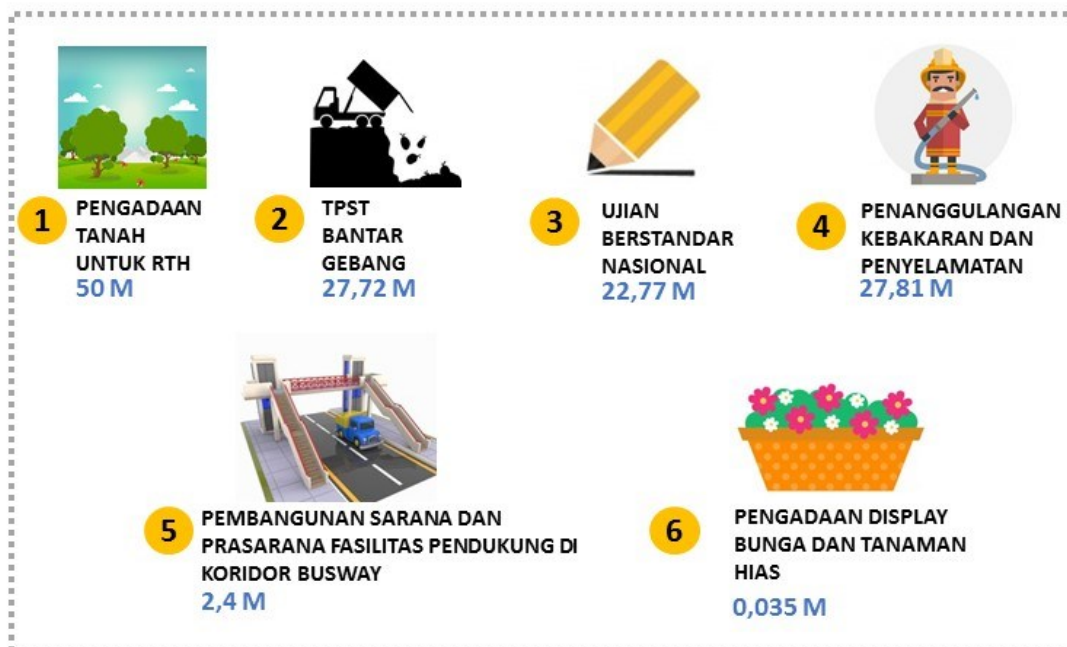
1. Terdapat penambahan target pendapatan sebesar Rp. 133,16 Miliar pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017, meliputi :
  - a. Retribusi Jasa Usaha (Rusun) sebesar Rp.27,88 Miliar;
  - b. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.105,28 Miliar.
2. Selain itu, terdapat pengurangan PMD untuk PT.MRT sebesar Rp.230 Miliar;
3. Sehingga, sesuai hasil pembahasan, total RAPBD Tahun Anggaran 2017 Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.70,19 Triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.97,45 Miliar dari KUA PPAS yang telah disepakati sebelumnya.



Gambar 3. RAPBD 2017

4. Adapun penambahan anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk:
- Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.50 Miliar;
  - TPST Bantar Gebang sebesar Rp.27,72 Miliar;
  - Ujian Berstandar Nasional sebesar Rp.22,77 Miliar;
  - Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp.27,81 Miliar;
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway Rp.2,4 Miliar;
  - Pemeliharaan Prasarana Hutan Mangrove Rp.2 Miliar;
  - Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias Rp.35 Juta.

## PENAMBAHAN ALOKASI BELANJA PADA POSISI RAPBD



Gambar 4. Penambahan Alokasi Belanja pada Posisi RAPBD

## C. Penyempurnaan RAPBD Hasil Evaluasi Kemendagri

1. Penyempurnaan konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dengan RAPBD dengan menggunakan sistem, terdapat 335 kegiatan atau 1,84% dari total 18.212 kegiatan yang tidak terdapat di RKPD, yang terdiri dari :

- a. **Tetap dianggarkan** : Kegiatan yang sebenarnya sudah ada di RKPD pada UPT Museum Prasasti, namun karena UPT tersebut dibubarkan, kegiatannya dipindahkan ke Museum Kesejarahan (sehingga di sistem seolah-olah menjadi kegiatan baru), dengan jumlah kegiatan sebanyak **7 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.1,03 Miliar**;
- b. **Tetap dianggarkan** : Kegiatan tidak ada di RKPD, namun *given* dari APBN yaitu DAK Non Fisik, dengan jumlah kegiatan sebanyak **137 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.5,34 Miliar**;
- c. **Tetap dianggarkan** : Perbaikan nomenklatur kegiatan rehab total sekolah, puskesmas/RSUK dan rusun yang sebenarnya **sudah ada di RKPD** namun karena dilakukan penambahan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2016, maka kegiatan tersebut di sistem seolah-olah menjadi kegiatan baru; dengan jumlah kegiatan sebanyak **10 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.5,04 Triliun**;
- d. **Tetap dianggarkan** : Belanja rutin kelurahan yang belum terinput (ATK, TALI, dll), dengan jumlah kegiatan sebanyak **21 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.1,4 Miliar**;
- e. **Tetap dianggarkan** : Kegiatan yang muncul karena adanya MoU antara Kemendiknas dan Pemprov. DKI Jakarta, dengan jumlah kegiatan sebanyak **80 kegiatan** (Sertifikasi Guru) dengan total anggaran sebesar **Rp.11,72 Miliar**;
- f. **Tetap dianggarkan** : Perpanjangan waktu Multiyears yang telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam KUA-PPAS, untuk pembangunan jalan non tol (Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Cileduk), dengan jumlah kegiatan sebanyak **1 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.50,07 Miliar**;
- g. **Tetap dianggarkan** : Pemenuhan prasyarat UU untuk menyusun KLHS Grand Design Kepulauan Seribu dan KLHS RPJMD, dengan jumlah kegiatan sebanyak **2 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.747,13 Juta**;
- h. **Tetap dianggarkan** : Pada RKPD tahun 2017 telah tercantum rehab berat gedung sekolah. Namun dengan adanya rehab berat yang tidak terlaksana pada tahun 2016, kegiatan tersebut diusulkan kembali pada tahun 2017 (meskipun tercantum di dalam RKPD 2016), di sistem menjadi kegiatan baru.  
  
Pada pembahasan antara TAPD dengan Banggar, kegiatan dimaksud dianggap memenuhi kriteria mendesak dan tetap dianggarkan dengan ketentuan akan dilakukan cek lapangan kembali, yaitu **55 kegiatan** rehab berat gedung sekolah dan rehab planetarium, dengan total anggaran sebesar **Rp.98,16 Miliar**;
- i. **Tetap dianggarkan** : Pembayaran Utang Pihak Ke Tiga yang telah diaudit tetap dianggarkan, dengan jumlah kegiatan sebanyak **3 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.129 Juta**;
- j. **Dinolkan** : Kegiatan yang tidak terdapat di RKPD dan disepakati bersama antara Banggar dan TAPD untuk dihapus, dengan jumlah kegiatan sebanyak **19 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.46,72 Miliar**;

# PENYEMPURNAAN RAPBD HASIL EVALUASI KEMENDAGRI



## 1 PENYEMPURNAAN KONSISTENSI PROGRAM & KEGIATAN ANTARA RKPD & RAPBD

1,03 M	7 kegiatan UPT Museum Prasasti dipindahkan ke Museum Kesejarahan		50,07 M	1 kegiatan pembangunan jalan layang non tol (Kapt. Tendea – Blok M – Cileduk) yang merupakan perpanjangan waktu <i>multiyears</i>	
5,34 M	137 kegiatan DAK non fisik ( <i>given</i> dari APBN)		0,747 M	2 kegiatan pemenuhan prasyarat UU untuk menyusun KLHS Grand Design Kepulauan Seribu dan KLHS RPJMD	
5,04 T	10 kegiatan dengan perbaikan nomenklatur kegiatan rehab total sekolah, puskesmas/RSUK dan rusun (seolah-olah baru)		98,16 M	55 kegiatan dengan kriteria mendesak dan tetap dianggarkan dengan ketentuan akan dilakukan cek lapangan kembali	
1,4 M	21 kegiatan belanja rutin kelurahan yang belum terinput		0,129 M	3 kegiatan pembayaran utang pihak ketiga yang telah diaudit	
11,72 M	80 kegiatan yang muncul karena MoU antara Kemendiknas dan Pemprov DKI		46,72 M	19 kegiatan yang disepakati Banggar dan TAPD untuk dihapus karena tidak terdapat di RKPD	

2. Penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terkait dengan rasionalitas, kewajaran, manfaat, serta penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut :

- Kegiatan dengan anggaran dinolkan, dengan jumlah kegiatan sebanyak **2 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.2,24 Miliar**;
- Kegiatan dengan anggaran ditambah, dengan jumlah kegiatan sebanyak **18 kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.8,5 Miliar**;
- Belanja bantuan sosial yang dialihkan ke dalam belanja hibah, sebesar Rp.1,26 Miliar.
- Pengurangan Premi Asuransi, merupakan selisih input karena perubahan kode rekening sebesar **Rp.13,25 Miliar**;
- Pemindahan belanja hibah lembaga P2TP2A (BTL) yang berubah menjadi UPT (BL),

## 2 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERKAIT DENGAN RASIONALITAS, KEWAJARAN, MANFAAT, SERTA PENYESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016

1,91 M	2 kegiatan dengan anggaran dinolkan	 
8,5 M	18 kegiatan dengan anggaran ditambah	
1,26 M	Pengalihan belanja bantuan sosial ke dalam belanja hibah	
13,25 M	Pengurangan premi asuransi akibat perubahan kode rekening	
4 M	Pemindahan belanja hibah lembaga P2TP2A (BTL) yang berubah menjadi UPT (BL)	

Gambar 5. Penyempurnaan RAPBD Hasil Evaluasi Kemendagri

3. Rincian 19 kegiatan atau 0,1% dari total 18.212 kegiatan sebesar Rp.46,72 Miliar disepa-  
kati antara TAPD dan Banggar untuk dihapus:

1)	Pengadaan Sarana SMK Negeri 64 Jakarta	4,04	Miliar
2)	Migrasi Listrik dari Pasca Bayar menjadi Pra Bayar di Rumah Susun	7,49	Miliar
3)	Dampingan Tenaga Ahli untuk Kegiatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	6,20	Miliar
4)	Sewa Mesin Fotocopy GOR Sunter dan GOR Bahtera Jaya	78,00	Juta
5)	Renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Besakih, Kuningan Jakarta Selatan	1,62	Miliar
6)	Revitalisasi Peralatan Kebakaran dan Instalasi Hidrant Gedung Blok G Komplek Balaikota	3,22	Miliar
7)	Seleksi dan Pengembangan Kurikulum Keasramaan/boarding JIC	5,48	Juta
8)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Asrama/boarding JIC	1,69	Miliar
9)	Penyediaan Perlengkapan Keasramaan/boarding JIC	5,55	Miliar
10)	Rehab Ruang Alat Kelengkapan Dewan	396,45	Juta
11)	Rehab Ruang Outlet Loby Gedung DPRD	456,60	Juta
12)	Asuransi Kendaraan Dinas Anggota Dewan	860,77	Juta
13)	Penataan dan Rehab Kolam Gedung DPRD	579,02	Juta
14)	Pengadaan BOX Control Ac Chiller York	6,53	Miliar
15)	Penyediaan Jasa Pengemudi	4,65	Miliar
16)	Perbaikan Rumah Dinas Ketua DPRD	1,44	Miliar
17)	Penyelenggaraan Apel Gabungan Tiga Pilar (TNI, POLRI dan PEMDA)	1,61	Miliar
18)	Penyediaan / sewa rumah untuk keperluan dinas KPKD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	79,20	Juta
19)	Keikutsertaan Dalam Pameran	180,22	Juta

## D. Penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

### 1. Ringkasan APBD

Total APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.70,19 Triliun, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah sebesar 62,46 Triliun, terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.41,48 Triliun, meliputi :

- Pajak Daerah sebesar Rp.35,23 Triliun;
- Retribusi Daerah sebesar Rp.677,88 Miliar;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.453,33 Miliar;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,12 Triliun.

2) Dana Perimbangan sebesar Rp.18,77 Triliun, meliputi :

- Dana Bagi Hasil sebesar Rp.15,62 Triliun;
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.3,14 Triliun.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.2,20 Triliun, yang seluruhnya berasal dari Pendapatan hibah;

b) Belanja Daerah sebesar Rp.63,61 Triliun, terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.28,05 Triliun, meliputi :

- Belanja Pegawai sebesar Rp.20,14 Triliun;
- Belanja Bunga sebesar Rp.49,22 Miliar;
- Belanja Subsidi sebesar Rp.3,23 Triliun
- Belanja Hibah sebesar Rp.1,45 Triliun;
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2,49 Triliun;
- Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.348,80 Miliar;
- **Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.325,48 Miliar.**

2) Belanja Langsung sebesar Rp.35,55 Triliun, meliputi :

- Belanja Pegawai sebesar Rp.3,06 Triliun;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.16,60 Triliun;
- Belanja Modal sebesar Rp.15,88 Triliun.

c) Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1,14 Triliun, terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.7,72 Triliun, meliputi :

- SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp.5,70 Triliun;
- Pinjaman Daerah : MRT sebesar Rp.2,02 Triliun;

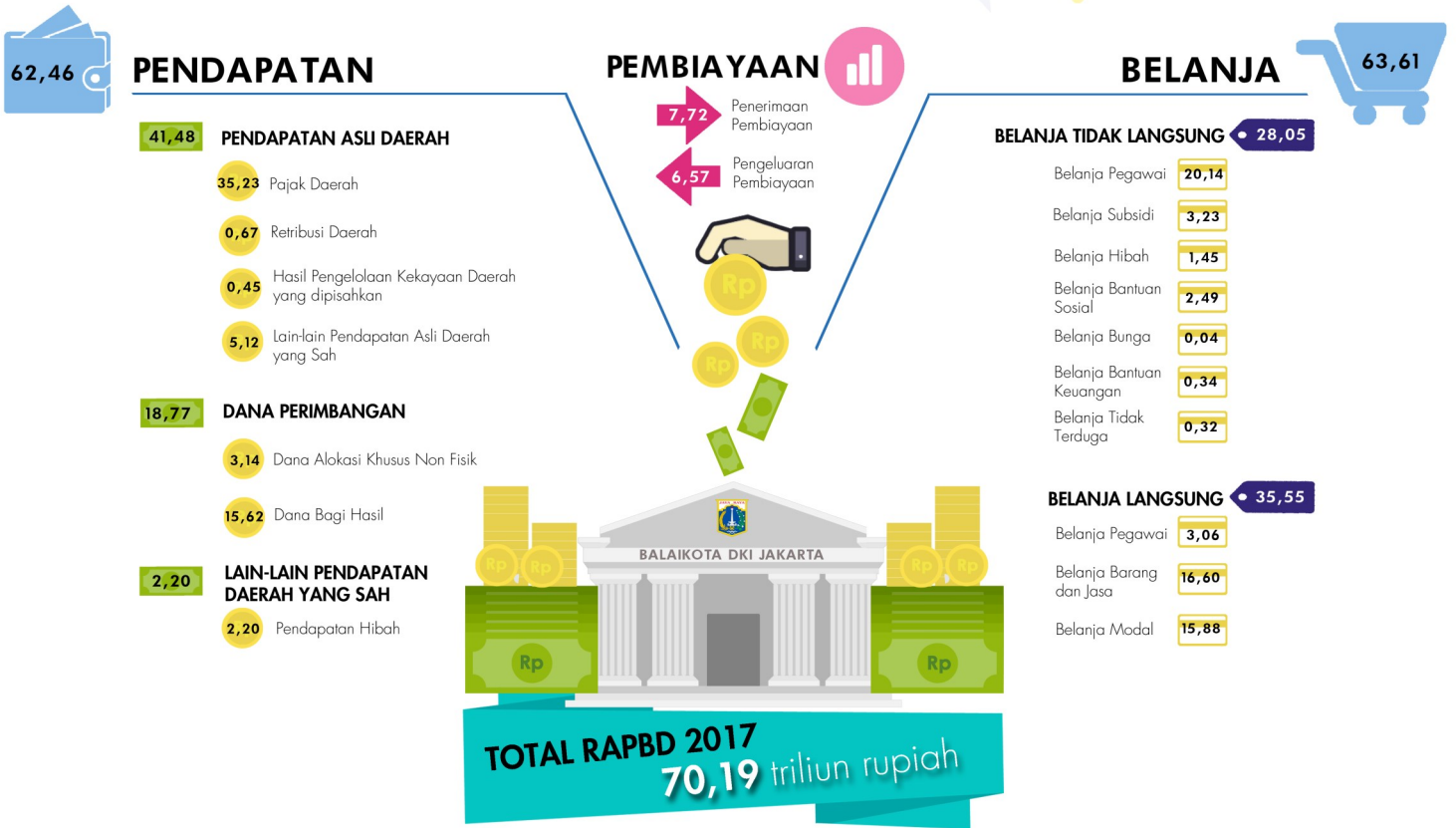
2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.6,57 Triliun, meliputi :

- Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.6,56 Triliun;
- Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.17,19 Miliar.



# RINGKASAN RAPBD 2017

(dalam Triliun Rupiah)



Gambar 6. Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

## 2. Komposisi Belanja Paling Besar

Komposisi alokasi belanja dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 paling besar adalah:

- Anggaran Pendidikan sebesar Rp.17,49 Triliun atau 27,51 persen dari total Belanja APBD (meliputi BL dan BTL);
- Anggaran Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas sebesar Rp.12,73 Triliun atau 18,15 persen dari total APBD (meliputi BL, BTL dan Pembiayaan);
- Anggaran Kesehatan sebesar Rp.8,27 Triliun atau 13,00 persen dari total belanja APBD (meliputi BL dan BTL);
- Anggaran Rusun dan Fasilitas Pendukung sebesar Rp.4,66 Triliun atau 7,33 persen dari total belanja APBD (BL);
- Anggaran Penanggulangan Banjir sebesar Rp.3,12 Triliun atau sebesar 4,91 persen dari total Belanja APBD (BL);
- Anggaran Penanganan Kebersihan dan Sampah sebesar Rp.2,98 Triliun atau 4,69 persen dari total Belanja APBD (BL).



Gambar 7. Komposisi Belanja (Termasuk Pembiayaan) Paling Besar



## **BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA**

**GEDUNG BALAIKOTA BLOK G LANTAI 2  
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 8-9, JAKARTA PUSAT**